

## Analisis Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan Pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta (Periode 2005-2021)

Farah Hanieva Alfadhillah

e-mail: [farahhanievaa@gmail.com](mailto:farahhanievaa@gmail.com)

Nadia Nur Windari

e-mail: [nadianwindari@gmail.com](mailto:nadianwindari@gmail.com)

Mirda Nurparida

e-mail: [mirdanurparida@gmail.com](mailto:mirdanurparida@gmail.com)

Muhammad Affan Widyarif

e-mail: [muhammadaffanwidyarif@gmail.com](mailto:muhammadaffanwidyarif@gmail.com)

(Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Islam Bandung,  
Bandung)

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh antara IPM, APS, dan Upah Minimum terhadap tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi di Provinsi D.I. Yogyakarta. Provinsi D.I. Yogyakarta yang sering dijuluki pusat pendidikan dibuktikan dengan IPM dan APS tertinggi di Pulau Jawa ini memiliki ketimpangan tertinggi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yaitu menggunakan metode analisis regresi berganda dengan estimator OLS (Ordinary Least Square) dan alat analisis uji asumsi klasik. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber resmi seperti BPS dan instansi resmi lainnya. Teknik Pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan IPM tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan. Variabel APS berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Upah Minimum memiliki pengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2005-2021.

**Kata kunci** – Upah Minimum, Ketimpangan Pendapatan, Pengaruh, Analisis Regresi Linear Berganda

**ABSTRACT :** This study aims to examine the effect of HDI, APS, and the Minimum Wage on the high level of income inequality in DI Yogyakarta Province. DI Yogyakarta province, which is often dubbed the center of education, is evidenced by the highest HDI and NER on the island of Java, which has the highest inequality in Indonesia. The method used in this study is a descriptive method with a quantitative approach, namely using multiple regression analysis methods with OLS (Ordinary Least Square) estimator and classical assumption test analysis tool. The data used are secondary data obtained from official sources such as BPS and other official agencies. Data collection techniques using literature study. The results showed that HDI had no effect on Income Inequality. The APS variable has a significant effect on Income Inequality and the Minimum Wage has an effect on Income Inequality in the Province of DI Yogyakarta in 2005-2021.

**Keywords** –Minimum Wages, Income Inequality, Effect, Multiple Linear Regression Analysis

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan negara merupakan isu krusial dan termasuk penting karena menjadi target utama Indonesia dalam SDG's di Tahun 2030 mendatang. Mendukung aksi pembangunan negara yang dilakukan, maka setiap Provinsi di Indonesia harus dapat berkontribusi dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pada negara berkembang seperti Indonesia sendiri, dua masalah besar yang seringkali dihadapi adalah kesenjangan ekonomi dan ketimpangan dalam distribusi pendapatan (Sutrisno, 2018) dalam (Rachmawatie, 2021). Ketimpangan pendapatan menjadi suatu ukuran pendistribusian pendapatan masyarakat di suatu daerah atau suatu wilayah dengan kurun waktu tertentu. Semakin tingginya tingkat ketimpangan pendapatan di suatu daerah berarti distribusi pendapatannya semakin tidak merata (Khoirudin & Musta'in, 2020). Keadaan seperti ini pada akhirnya akan memperlebar jurang antara masyarakat dengan tingkat ekonomi yang baik (kelompok kaya) dengan mereka yang berpenghasilan rendah (kelompok miskin) (Amri, 2017).

Ketimpangan pendapatan setiap provinsi di Insonesia masih terjadi dan perbedaanya cukup tinggi. Di Pulau Jawa saja contohnya, provinsi yang memiliki ketimpangan tertinggi se-Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dipegang oleh D.I. Yogyakarta (B. Suryani, 2021). BPS mencatat bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk atau dikenal *Gini Ratio* provinsi Yogyakarta pada 3 tahun terakhir pada 2018-2021 masih menjadi provinsi dengan ketimpangan tertinggi. Menurut data Badan Pusat Statistik. Pada tahun 2018 *gini ratio* D.I. Yogyakarta adalah 0,441 dan turun pada tahun 2019 menjadi 0,423, kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 0,434 hingga tahun 2021 kembali meningkat menjadi 0,441.

Provinsi D.I. Yogyakarta mengalami ketimpangan tertinggi sejak Maret 2018. *Gini ratio* nya mencapai hingga 0,441 pada Maret 2021. Selanjutnya gini ratio tersebut menurun pada September 2021 menjadi 0,436 (Jayani, 2022). Menurut Ketua Dewan Pengurus Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3S), Didik Junaedi Rachbini penyebab kesenjangan ekonomi di Yogyakarta adalah pertumbuhan ekonomi yang pesat di sektor pariwisata dan pendidikan. Pertumbuhan ini telah terjadi selama 10 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di sektor pendidikan dan pariwisata telah meningkatkan pendapatan kelas menengah dan atas. Namun, kelas bawah tidak terpengaruh oleh pertumbuhan ekonomi (Anshori, 2020).

Pembangunan ekonomi yang berhasil adalah jika suatu wilayah atau daerah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta juga meningkatkan taraf hidup secara merata atau dapat diukur menggunakan IPM (Irawan, 2002:5) dalam (Kusuma et al., 2019). Menurut Badan Pusat Statistik, IPM dapat diukur menggunakan tiga dimensi yang meliputi Kesehatan, Pendidikan, dan Standar hidup Layak. Karena itu pengukuran untuk Indeks Pembangunan Manusia dapat menentukan kesejahteraan masyarakat. Provinsi D.I Yogyakarta merupakan provinsi yang memiliki IPM tertinggi kedua di Indonesia. Hasil data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, IPM provinsi D.I. Yogyakarta selama 10 tahun dari 2010 hingga 2010 selalu mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan 0,03% atau turun 0,02 poin dari tahun 2019 79,99 poin di tahun 2019 menjadi 79,97. Peningkatan IPM di Provinsi D.I. Yogyakarta ini ditopang oleh peringkat tertingginya adalah Harapan Lama Sekolah dan kemudian Rata-rata Lama Sekolah yang tercatat sebagai peringkat kelima tertinggi secara nasional (Parwanto, 2021).

Masalah terkait ketimpangan pendapatan dapat diatasi juga dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Mutu Pendidikan, Derajat Kesehatan dan perbaikan gizi yang

diharapkan dapat menciptakan banyak lapangan kerja baru. Maka produktivitas nasional dan daerah dapat meningkat (Anshari et al., 2018). Dalam penelitian Istikharoh et al, (2018) dikatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Pendidikan menjadi aspek penopang utama dalam mewujudkan pembangunan negara, Provinsi D.I. Yogyakarta dijuluki sebagai kota pelajar karena banyaknya pusat pendidikan dan pengaruh oleh simbol-simbol pendidikan di Yogyakarta seperti validitas fisik dan sosial (Ciputra, 2022). Label kota pelajar yang disematkan kepada Yogyakarta juga dibuktikan dengan adanya 4 perguruan tinggi negeri dan 106 perguruan tinggi swasta di Provinsi D.I. Yogyakarta (Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta, 2020). Selain itu, Tingkat Penyelesaian Pendidikan Provinsi Yogyakarta pada Tahun 2020 jenjang SMA/Sederajat nilainya paling tinggi dibandingkan provinsi lain yaitu sebesar 87,99% (Badan Pusat Statistik) dan angka IPM Provinsi D.I Yogyakarta tertinggi kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta yaitu sebesar 80,22% (Badan Pusat Statistik, 2021). Dari 34 provinsi di Indonesia, data komponen penunjang di bidang Pendidikan D.I. Yogyakarta termasuk yang tertinggi, maka ini bisa dilihat bahwa minat Pendidikan akan masyarakat D.I. Yogyakarta sangat baik, terlebih julukan kota pelajar yang disematkan memang betul adanya.

Daerah Istimewa Yogyakarta telah mendeklarasikan sebagai kota inklusif, serta memiliki komitmen dalam hal pendidikan inklusif yang terbukti dari penghargaan Inclusive Award (Andini et al., 2018). Selain itu, Angka partisipasi sekolah (APS) diantara ke empat provinsi di pulau Jawa yang paling tinggi persentasenya terdapat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rata-rata APS sebesar 80,94%. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki persentase angka partisipasi sekolah (APS) paling tinggi di karenakan Provinsi DIY mendapatkan julukan Kota Pelajar sehingga mayoritas masyarakat di Provinsi DIY rata-rata berpendidikan (Giovanni, 2018).

Ketimpangan pendapatan dipengaruhi besar oleh upah minimum. Dampak dari upah minimum akan mempengaruhi distribusi upah dalam dua cara, yaitu pengaruh langsung ketika ada pekerja dengan upah lebih rendah (di bawah upah minimum) menjadi setara dengan upah minimum dan pengaruh tidak langsung atau dampak spillover ketika kebijakan upah minimum akan meningkatkan penghasilan upah di atas upah minimum (Rohmah & Sastiono, 2021). Dalam penelitian Lin & Yun, (2016) menunjukkan bahwa di Negara China perubahan upah minimum secara signifikan membantu mengurangi kesenjangan pendapatan diujung bawah distribusi pendapatan. Kemudian penelitian oleh Istikharoh et al., (2018) yang juga mengatakan bahwa upah minimum berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Maka kebijakan untuk meningkatkan upah dapat memperbaiki ketimpangan pendapatan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **IPM (Indeks Pembangunan Manusia)**

Pembangunan manusia adalah proses pembangunan yang bertujuan untuk memungkinkan lebih banyak pilihan, terutama dalam hal pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting untuk mengukur berhasil tidaknya pembangunan kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Komposisi IPM didasarkan pada tiga indikator yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup (daya beli) atau pendapatan. Peningkatan pendidikan seseorang sering dikaitkan dengan peningkatan pendapatan atau upah yang diperoleh. Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang

memiliki tingkat pendidikan tinggi maupun pengalaman pelatihan, semakin tinggi produktivitasnya dan hasilnya ekonomi nasional akan tumbuh lebih tinggi (Sukmawati, 2018). Pembangunan manusia yang berhasil akan meningkatkan rata-rata usia masyarakat dan meningkatkan pengetahuan, sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tercapainya kedua hal tersebut akan semakin meningkatkan produktivitas dan dengan demikian pada akhirnya kualitas hidup, dalam artian kehidupan yang layak (Raharti et al., 2020). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu mengenai IPM yang memiliki pengaruh simultan dan berhubungan positif terhadap ketimpangan pendapatan (Yanthi & Sutrisna, 2021; Afini, 2019; Arif & Wicaksana, 2017).

### **Angka Partispasi Sekolah**

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan (sekolah) terhadap penduduk usia sekolah. Cakupan usia sekolah yaitu usia 7 – 12 tahun mengikuti pendidikan sekolah dasar, usia 13 – 15 tahun mengikuti pendidikan menengah pertama, usia 16 – 18 tahun mengikuti pendidikan menengah atas dan usia 19 – 24 tahun mengikuti pendidikan perguruan tinggi. APS yang tinggi menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan (Wahyuni et al., 2020a). Dian Pertiwi (2017) dalam (Wahyuni et al., 2020b) menuliskan APS adalah salah satu indikator keberhasilan pembangunan layanan pendidikan di Indonesia sehingga bagi pemerintah, begitu penting untuk mengetahui APS di setiap periodenya (dalam tahun) agar pemerintah dapat menyiapkan tindakan atau rencana untuk meningkatkan kemajuan pendidikan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu mengenai Tingkat pendidikan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (Istikharoh et al., 2018).

### **Tingkat Upah Minimum**

Upah minimum merupakan upah terendah yang digunakan oleh pengusaha sebagai standar untuk menjamin upah riil pekerja atau pekerja yang dipekerjakan di perusahaannya (Zaeni Asyhad, 2007 dalam (Hasanah, 2021). Setiap daerah sudah menentukan besaran tingkat upah oleh Dewan pengupahan. Upah minimum berpengaruh terhadap jumlah pengangguran daerah. Upah minimum yang rendah akan meringankan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sedangkan upah minimum yang tinggi akan memaksa perusahaan mengurangi jumlah pekerja untuk menekan biaya input mereka (Mulya Pratomo & Setyadharna, 2019). Ketimpangan pendapatan dipengaruhi besar oleh upah minimum. Dampak dari upah minimum akan mempengaruhi distribusi upah dalam dua cara, yaitu pengaruh langsung ketika ada pekerja dengan upah lebih rendah (di bawah upah minimum) menjadi setara dengan upah minimum dan pengaruh tidak langsung atau dampak spillover ketika kebijakan upah minimum akan meningkatkan penghasilan upah di atas upah minimum (Rohmah & Sastiono, 2021). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh kebijakan peningkatan upah minimum menyebabkan peningkatan ketimpangan pendapatan tanpa menyertakan dampak pengangguran (Rohmah & Sastiono, 2021). Selain itu terdapat penelitian dari K. G. Suryani & Woyanti, (2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel upah minimum kabupaten / kota mempengaruhi ketidaksetaraan distribusi pendapatan di provinsi / kota Yogyakarta.

### **Ketimpangan Pendapatan**

Damanik, Zulgani dan Rosmeli (2018) dalam Nadhifah & Wibowo, (2021) bahwa ketimpangan pendapatan merupakan masalah yang berkaitan dengan pendapatan yang diperoleh suatu komunitas dalam suatu wilayah antar kelompok. Distribusi pendapatan dapat dibedakan menjadi dua yaitu distribusi pendapatan relatif dan distribusi pendapatan absolut (Afini, 2019).

Menurut Dumairy (1996), pengukuran ketimpangan atau ketimpangan pendapatan dapat menggunakan dua kriteria, seperti penggunaan Gini ratio oleh Bank Dunia. Menurut (Khoirudin & Musta'in, 2020) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dengan derajat ketimpangan distribusi pendapatan, sehingga kenaikan atau penurunan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap derajat ketimpangan distribusi pendapatan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rahmadi & Parmadi, (2019) Ketimpangan pendapatan dan kemiskinan telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah di pulau-pulau Indonesia.

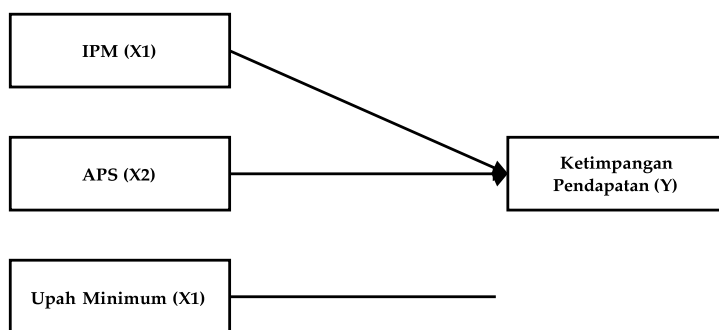
## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan metode analisis regresi berganda. Penelitian kuantitatif merupakan suatu pendekatan berdasarkan filosofi positivis untuk melihat populasi dan sampel tertentu dan pengumpulan data dengan alat penelitian dan dianalisis secara statistik, dimaksudkan untuk menguji hoptesis (Sugiyono, 2017:11). Data yang digunakan adalah data sekunder yang proses pengumpulan datanya diperoleh dari sumber-sumber resmi seperti BPS dan data-data publikasi yang dikeluarkan oleh instansi resmi. Teknik Pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Studi pustaka adalah penelitian berdasarkan karya tulis, hasil penelitian yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan (Embun, 2012 dalam Asy'ari dkk., 2021). Penelitian ini menggunakan alat analisis uji asumsi klasik berupa: uji normalitas, uji heterokesdasitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinieritas, serta pengujian hipotesis; koefisien determinasi, uji F dan uji T melalui software IBM SPSS Statistics 26.

## **Objek Penelitian**

Indonesia memiliki 34 provinsi, dimana setiap provinsi mempunyai keunggulan pada bidangnya masing-masing. Penelitian kami berfokus kepada provinsi D.I. Yogyakarta karena keunggulannya dalam pembangunan dibidang pendidikan dan menjadi provinsi dengan IPM tertinggi. Data untuk penelitian mengambil periode 2005-2021.

## **Variabel Penelitian**



**Gambar 1. Rancangan Penelitian**

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data ini merupakan teknik untuk melihat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, dimana digunakan lebih dari satu variabel independen (Asra, 2017 dalam Giovanni, 2018). Penelitian ini menggunakan regresi linier dengan estimator OLS (Ordinary Least Square).

### **PEMBAHASAN**

Uji Asumsi Klasik digunakan untuk mengetahui apakah terdapat masalah dalam data untuk regresi. Dalam melakukan regresi uji asumsi klasik adalah syarat yang harus dipenuhi dalam regresi linier berganda yang berdasar pada Ordinary Least Square (OLS). Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak (Arifin, 2018). Penelitian yang berjudul Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Partisipasi Sekolah dan Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan di D.I. Yogyakarta Tahun 2010-2021 ini menggunakan uji normalitas dengan one sample *kolmogorov smirnov test*.

#### **Uji Asumsi Klasik Uji**

##### **Normalitas**

Berdasarkan hasil uji normalitas bahwa nilai signifikansi  $0,02 < \alpha (0,05)$  maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual tidak berdistribusi normal. Perlu dilakukan upaya dengan mentransformasikan variabel independent yaitu X1, X2, dan X3 karena nilainya sangat signifikan atau terlalu besar perbedaannya.

Setelah dilakukan transformasi pada variabel independent, data berdistribusi secara normal karena nilai signifikansi  $0,2 > \alpha (0,05)$ . Maka selanjutnya adalah uji multikolinearitas yang merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi linier berganda. Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi interkorelasi (hubungan yang kuat) antar variabel independen.

##### **Uji Multikolinearitas**

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada nilai Tolerance variabel APS  $0,275 > 0,10$  maka tidak terjadi multikolinearitas. Tetapi nilai Tolerance variabel IPM  $0,027 < 0,10$  dan Tingkat Upah Minimum  $0,027 < 0,10$  maka artinya terjadi multikolinearitas. Melihat dari nilai VIF pada nilai VIF variabel APS  $3,639 < 10$  tidak terjadi multikolinearitas. Tetapi nilai VIF variabel IPM  $36,39 > 10$  dan Tingkat Upah  $36,42 > 10$  maka terjadi multikolinearitas. Karena dua variabel mengalami multikolinearitas maka hal ini harus diatasi atau dilakukan metode penyembuhan dengan menghilangkan salah satu variabel independen yang mengalami multikolinearitas. Dipilih variabel X1 karena variabel IPM memiliki nilai Tolerance paling tinggi.

Berdasarkan hasil penyembuhan untuk uji multikolinearitas pada tabel 3 nilai Tolerance variabel APS  $0,28 > 0,10$  maka tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian nilai Tolerance variabel Tingkat Upah Minimum  $0,28 > 0,10$  maka artinya terjadi multikolinearitas. Melihat dari nilai VIF pada nilai VIF variabel APS  $3,574 < 10$  tidak terjadi multikolinearitas dan variabel Tingkat Upah Minimum  $3,574 < 10$  artinya tidak terjadi multikolinearitas.

### Uji Heteroskedastis

Berdasarkan Uji Heteroskedastis pada tabel 3 menggunakan uji glejser maka ditarik kesimpulan bahwa ketiga variabel independent yaitu IPM, APS, dan Tingkat Upah Minimum  $> \alpha$  (0,05). Dimana IPM nilainya  $0,877 > 0,05$  Tidak terjadi Heteroskedastis. APS nilainya  $0,939 > 0,05$  Tidak terjadi Heteroskedastis, dan Tingkat Upah Minimum nilainya  $0,911 > 0,05$  Tidak terjadi Heteroskedastis.

### Uji Autokorelasi

Berdasarkan Uji Autokorelasi pada tabel 4 menggunakan Durbin Watson bahwa nilai  $d = 2,544$ . Karena nilai  $k = 3$  dan  $n = 17$  maka nilai  $dL = 0,897$  dan  $dU = 1,710$ . Sedangkan untuk nilai  $4 - dU = 2,29$ . Dari sini dapat disimpulkan bahwa  $4 - dU < d < 4 - dL$  atau  $0,658 < 2,389 < 3,342$  maka tidak ada kesimpulan yang dapat ditarik dari data ini.

### Uji Regresi Berganda

Uji regresi berganda yang meliputi Uji R-Square, Uji F, dan penentuan koefisien untuk persamaan disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 1. Hasil Uji Regresi Berganda**

Uji R-Square						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate		
1	,910 <sup>a</sup>	,827	,787	,013090		
Uji F						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
2	Regression	,011	3	,004	20,757	,000 <sup>b</sup>
	Residual	,002	13	,000		
	Total	,013	16			
Coefficients						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
3	(Constant)	,317	2,320		,137	,893
	X1	-,827	,664	-,866	-1,245	,235
	X2	,604	,190	,697	3,170	,007
	X3	,067	,043	1,090	1,566	,141

Hasil regresi menunjukkan bahwa besarnya korelasi atau hubungan (nilai R) yaitu sebesar 0,91. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,827, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 82,7%. Berdasarkan output hasil regresi diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh variabel X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y adalah sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai F hitung  $20,757 > F$  tabel 3,34, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan terdapat pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y. Berdasarkan hasil perhitungan regresi berganda nilai koefisien konstanta sebesar 0,317 nilai koefisien IPM sebesar -0,827, nilai koefisien APS sebesar 0,604 dan nilai koefisien Upah Minimum 0,067.

$$Y = 0,317 - 0,827IPM + 0,604APS + 0,067UM + e$$

Hasil Persamaan Regresi berganda tersebut memberikan pengertian sebagai berikut :

1. Variabel IPM (X1) berpengaruh negatif dan tidak signifikan mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan karena nilai signifikansinya  $0,235 > \alpha$  (0,05) dan nilai koefisiennya sebesar -0,827 yang menyatakan jika setiap 1% IPM meningkat maka ketimpangan pendapatan akan turun sebesar 82,7%.
2. Variabel APS (X2) berpengaruh positif berpengaruh signifikan pada Ketimpangan Pendapatan karena nilai signifikansinya  $0,007 < \alpha$  (0,05) dan nilai koefisiennya sebesar 0,604 yang menyatakan jika setiap 1% APS meningkat maka ketimpangan pendapatan akan meningkat juga sebesar 60,4%.
3. Variabel Upah Minimum (X3) berpengaruh positif dan tidak signifikan mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan karena nilai signifikansinya  $0,141 > \alpha$  (0,05) dan nilai koefisien sebesar 0,067 yang menyatakan jika setiap 1% upah minimum meningkat maka ketimpangan pendapatan akan meningkat juga sebesar 6,7%

### Uji T

1. Diketahui nilai t hitung pada variabel X1 adalah  $-1,245 < t$  tabel 2,160, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel X1 yaitu IPM terhadap variabel Y yaitu ketimpangan pendapatan
2. Diketahui nilai t hitung pada variabel X2 adalah  $3,17 > t$  tabel 2,160, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel X2 yaitu APS terhadap variabel Y yaitu ketimpangan pendapatan
3. Diketahui nilai t hitung pada variabel X3 adalah  $1,566 > t$  tabel 2,160, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel X3 yaitu upah minimum terhadap variabel Y yaitu ketimpangan pendapatan



Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel IPM dan ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif. Peningkatan ketimpangan pendapatan berpengaruh terhadap turunnya IPM. Kualitas IPM akan meningkat akibat pesatnya perkembangan daerah dalam akses pelayanan seperti kesehatan dan pendidikan yang layak sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. SDM yang meningkat akan membuat seseorang lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih tinggi. Semakin tinggi pendapatan rata-rata maka semakin rendah ketimpangan pendapatan (Dwiputra, 2018; Yoertiara & Feriyanto, 2022). Sama halnya dengan variabel angka partisipasi sekolah berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan melalui aspek pendidikan dan berpengaruh terhadap SDM seperti pada aspek IPM. Variabel angka partisipasi sekolah berpengaruh positif dalam penelitian terhadap ketimpangan pendapatan.

Pada variabel upah minimum berpengaruh positif terhadap ketimpangan yang terjadi di Provinsi D.I Yogyakarta. Selaras dengan penelitian Sungkar et al., 2015 dimana upah minimum berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan yang terjadi di Indonesia. Indonesia sendiri yang tiap tahun mengalami peningkatan upah minimum juga turut menyumbang ketimpangan semakin tinggi. Setiap terjadinya kenaikan Rp. 1000 kenaikan upah minimum maka akan meningkatkan ketimpangan sebesar 0,0106. Kemampuan daya beli seseorang sangat ditentukan oleh tingkat upahnya yang akan menentukan tingkat kesejahteraan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Tentulah hal ini berpotensi menyebabkan ketimpangan, dengan adanya upah minimum maka gap antara seseorang berpendapatan tinggi dengan yang berpendapatan rendah akan lebih merata (Riandi & Varlitya, 2020).

## **KESIMPULAN**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2005-2021. Angka Partisipasi Sekolah (APS) berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2005-2021. Upah Minimum memiliki pengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2005-2021.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan Upah Minimum secara simultan berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2005-2021 atau dengan kata lain  $H_0$  ditolak yaitu terdapat pengaruh. Dari uji regresi dihasilkan model regresi Ketimpangan Pendapatan  $Y = 0,317 - 0,827IPM + 0,604APS + 0,067UM + e$ . Kami berharap bahwa penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya sekaligus menjadi penyempurnaan dari penelitian-penelitian serupa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Afini, N. (2019). Pengaruh Pdrb Perkapita Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Pemerataan Pendapatan Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan (JDEP)*, 2(2), 172–177. <https://doi.org/10.33005/jdep.v2i2.90>

- Amri, K. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan : Panel Data 8Provinsi di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi (EMT)*, 1(1), 1–11.
- Andini, D. W., Rahayu, A., Budiningsih, C. A., & Mumpuniarti, M. (2018). Pandangan Kepala Sekolah Mengenai Pendidikan Inklusif Dan Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Dasar Diy. *Taman Cendekia: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 2(2), 247–250. <https://doi.org/10.30738/tc.v2i2.3142>
- Anshari, M., Azhar, Z., & Ariusni. (2018). ANALISIS PENGARUH PENDIDIKAN , UPAH MINIMUM PROVINSI DAN BELANJA MODAL TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI SELURUH PROVINSI DI INDONESIA. *EcoGen*, 1(3), 494–502. <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/pek/article/view/4990>
- Anshori, R. (2020). Penyebab Ketimpangan Ekonomi di Yogyakarta | Tagar. *Tagar.Id*. <https://www.tagar.id/penyebab-ketimpangan-ekonomi-di-yogyakarta/>
- Arif, M., & Wicaksani, R. A. (2017). Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *University Research Colloquium (URECOL)*, 323–328.
- Arifin, S. R. (2018). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2018. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 8(1), 38–59. <https://doi.org/10.1905/iqtishadia.v8i1.4555>
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). Bps.Go.Id. Retrieved February 25, 2022, from <https://bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>
- Badan Pusat Statistik. (2021). Bps.Go.Id. <https://www.bps.go.id/indicator/26/494/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html>
- Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta. (2020). BPS Provinsi D.I. Yogyakarta. *Yogyakarta.Bps.Go.Id*. <https://yogyakarta.bps.go.id/statictable/2020/08/05/141/jumlah-perguruan-tinggi1-mahasiswa2-dan-tenaga-pendidik-negeri-dan-swasta-di-bawah-kementerian-riiset-teknologi-dan-pendidikan-tinggi-kementerian-pendidikan-dan-kebudayaan-menurut-kabupaten-kota-di-pr>
- BPS. (2020). Badan Pusat Statistik. Bps.Go.Id. <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>
- Ciputra, W. (2022). Awal Mula Yogyakarta Dijuluki Kota Pelajar Halaman 2 - Kompas.com. *Kompas.Com*. <https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/01/11/184512078/awal-mula-yogyakarta- dijuluki-kota-pelajar?page=2>
- Dwiputra, R. M. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia (periode 2011-2016). *MaulanaJurnal Ilmiah*, 6(2), 1–11.
- Giovanni, R. (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016. *Economics DevelopmentPdrb, Analisis Pengaruh Analysis Journal*, 7(1), 23–31. <https://doi.org/10.15294/edaj.v7i1.21922>

- Hasanah, U. (2021). The Effect of Investment , Unemployment , Minimum Wages on Labor Absorption in West Java Province 2008-2020. *International Journal of Economics, Business and Accounting Reseach (IJEBAR)*, 5(2), 505–518.
- Istikharoh, Prijanto, W. J., & Destiningsih, R. (2018). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 - 2018. *Directory Journal of Economic*, 2(1), 109–125.
- Jayani, D. H. (2022). Yogyakarta Masih Jadi Provinsi dengan Ketimpangan Tertinggi, Tapi Trennya Menurun | Databoks. Databoks.Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/23/yogyakarta-masih-jadi-provinsi-dengan-ketimpangan-tertinggi-tapi-trennya-menurun>
- Khoirudin, R., & Musta'in, J. L. (2020). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1), 17–30. <https://doi.org/10.35448/jte.v15i1.6407>
- Kurniawan, B. A., & Arianti, F. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Riil Mobil Toyota Kijang Innova Di Kota Semarang. *Diponegoro Journal of Economics*, 2(1), 1–6. <http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=75063>
- Kusuma, D. S. D., Sarfiah, S. N., & Septiani, Y. (2019). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2017. *Dinamic: Directory Journal of Economic*, 1(3), 282– 293.
- Lin, C., & Yun, M. S. (2016). The effects of the minimum wage on earnings inequality: Evidence from China. *Research in Labor Economics*, 44(9715), 179–212. <https://doi.org/10.1108/S0147-91212016000044012>
- Mulya Pratomo, A., & Setyadharma, A. (2019). The Effect of Wages, Economic Growth, and Number of Industries on Unemployment. *KnE Social Sciences*, 2020, 1266–1279. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i6.6677>
- Nadhifah, T., & Wibowo, M. G. (2021). Determinan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 24(1), 39–52.
- Parwanto, D. (2021). IPM DIY 2020 Tertinggi Kedua se-Indonesia - Sosial | RRI Yogyakarta | Rri.Co.Id. [https://rri.co.id/yogyakarta/565-sosial/957144/ipm-diy-2020-tertinggi-kedua-se-indonesia?utm\\_source=terbaru\\_widget&utm\\_medium=internal\\_link&utm\\_campaign=General Campaign](https://rri.co.id/yogyakarta/565-sosial/957144/ipm-diy-2020-tertinggi-kedua-se-indonesia?utm_source=terbaru_widget&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General Campaign)
- Rachmawatie, D. (2021). Apakah pendapatan asli daerah (PAD) mendorong ketimpangan distribusi pendapatan di Yogyakarta? *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(4), 831–838. <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i4.15720>
- Raharti, R., Sarnowo, H., & Aprillia, L. N. (2020). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 6(1), 36–53. <https://doi.org/10.24815/jped.v6i1.16364>

- Rahmadi, S., & Parmadi, P. (2019). Pengaruh ketimpangan pendapatan dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi antar pulau di Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 14(2), 55–66. <https://doi.org/10.22437/paradigma.v14i2.6948>
- Riandi, M., & Varlitya, C. R. (2020). Pengaruh Kemiskinan dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera Indonesia. *JURNAL EKOMBIS*, 6, 57–68.
- Rohmah, Z., & Sastiono, P. (2021). Pengaruh Kebijakan Peningkatan Upah Minimum terhadap Ketimpangan Upah (Studi Kasus Provinsi-Provinsi di Jawa) The Effect of the Minimum Wage Increase on Wage Inequality (Java Provinces Cases). *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 21(2), 235–256.
- Sukmawati, A. K. P. & U. S. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Tenaga Kerja dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *EQUILIBRIUM : Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 217–240. <http://eprints.ums.ac.id/80956/>
- Sungkar, S. N., Nazamuddin, & Nasir, M. (2015). Pengaruh Upah Minimum terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 3(2), 40–53.
- Suryani, B. (2021). DATA TERBARU: Tertinggi se-Indonesia, Angka Ketimpangan di Jogja Memprihatinkan - [Harianjogja.com. News.Harianjogja.Com.](https://news.harianjogja.com/read/2021/02/15/500/1063765/data-terbaru-tertinggi-se-indonesia-angka-ketimpangan-di-jogja-memprihatinkan)
- Suryani, K. G., & Woyanti, N. (2021). The Effect of Economic Growth, HDI, District/City Minimum Wage and Unemployment on Inequity of Income Distribution in Province of D.I Yogyakarta (2010- 2018). *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 36(2), 170. <https://doi.org/10.24856/mem.v36i2.1990>
- Wahyuni, N. N. S., Candiasa, I. M., & Juniantari, M. (2020a). Prediksi Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur Di Provinsi Bali Menggunakan Single Moving Average. *Maju*, 7(2), 101.
- Wahyuni, N. N. S., Candiasa, I. M., & Juniantari, M. (2020b). Prediksi Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur Di Provinsi Bali Menggunakan Single Moving Average. *Maju*, 7(2), 100–109. <https://akbid-dharmahusada-kediri.e-journal.id/JKDH/index>
- Yanthi, N. P. S. P., & Sutrisna, I. K. (2021). PENGARUH IPM DAN PMDN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI KABUPATEN / KOTA PROVINSI BALI. *E-Jurnal EP Unud*, 10(5), 2193–2222.
- Yoertiara, R. F., & Feriyanto, N. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan provinsi-provinsi di pulau Jawa. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 1(1), 92–100. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol1.iss1.art9>